

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Penulisan ini akan disajikan sebagai berikut, yang pertama yaitu tinjauan pustaka untuk menggambarkan konsep dasar variabel yang diteliti, yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Setelah itu peneliti akan membahas tentang kerangka hipotesis yang menjelaskan tentang model variabel, lalu diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

##### **2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2011) sebagai peningkatan output produksi barang dan jasa pada sebuah negara seperti perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah produksi barang industri, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Sementara itu Dumairy (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan produk domestik bruto tanpa melihat seberapa besarnya kenaikan tersebut apakah lebih besar atau lebih kecil dari

pertumbuhan penduduk, serta tidak memandang apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi yang pesat secara berkelanjutan memungkinkan negara industri maju memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya.

Pertumbuhan ekonomi yaitu salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilakukan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka dari itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.

#### **2.1.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Para Ahli**

Setelah memahami pengertian pertumbuhan ekonomi, maka akan di lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi dapat di definisikan sebagai penjelasan mengemai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadilah proses. Jadi teori pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah suatu cerita (yang logis) keterkaitan antar faktor ekonomi mengenai bagaimana pertumbuhan terjadi. Menurut Sukirno (2006: 432-437) teori

pertumbuhan ekonomi di kelompokkan menjadi empat yaitu, teori pertumbuhan klasik, teori Harrod-Domar dan teori pertumbuhan neo klasik.

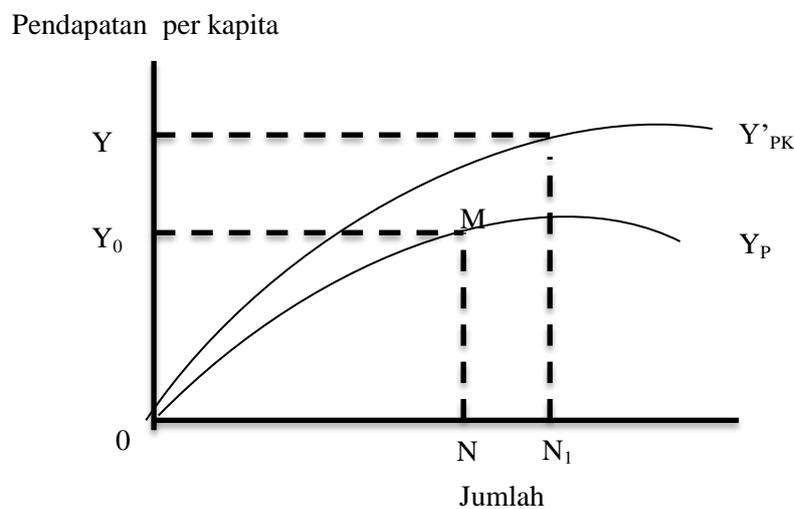
### **1. Teori Pertumbuhan Klasik**

Menurut pandangan para ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Para ahli ekonomi klasik menitik beratkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada pertumbuhan penduduk.

Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebih, tingkat pengembalian modal dari investasi yang di buat adalah tinggi, maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini akan menimbulkan investasi baru dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Tetapi keadaan seperti ini tidak akan terus berlangsung apabila jumlah penduduk terus bertambah, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif, dan menyebabkan kembali menurunnya kemakmuran masyarakat. Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah, apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (*stationary state*). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (*subsistence*). Menurut pandangan para ahli ekonomi klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan kaitan antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut

dinamakan teori penduduk optimum. Menurut teori ini jumlah penduduk yang terus bertambah akan menyebabkan pada suatu jumlah penduduk yang tertentu produksi marjinal telah sama dengan pendapatan per kapita. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimum. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimum. Secara grafik di gambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1**

### **Teori Pertumbuhan Klasik : Penduduk Optimum**

Sumber : Sukirno, Makro ekonomi, Edisi Ketiga: 2006

Kurva  $Y_{pk}$  menunjukkan tingkat pendapatan per kapita pada berbagai jumlah penduduk, dan M adalah puncak kurva tersebut. Maka penduduk optimal adalah jumlah penduduk sebanyak  $N_0$ , dan pendapatan per kapita yang paling maksimum adalah  $Y_0$ .

Selain itu Robert Malthus berpendapat, ukuran keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yaitu jika PNB potensialnya meningkat. Sektor yang dominan adalah pertanian dan industri. Jika output di

kedua sektor tersebut ditingkatkan, maka PNB potensialnya akan bisa ditingkatkan. Ada dua kelompok faktor yang sangat menentukan pertumbuhan, yaitu faktor-faktor ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Dan faktor-faktor nonekonomi seperti keamanan atas kekayaan, konsistensi dan hukum yang pasti, etos kerja dan disiplin pekerja yang tinggi. (Tulus T.H Tambunan, 1996:41).

Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan pendapatan nasional atau produk domestik regional bruto diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir (*final demand*) atas output yang dihasilkan dalam perekonomian, diukur pada harga pasar yang berlaku. Dengan perkataan lain produk nasional atau produk domestik regional bruto adalah penjumlahan nilai pasar dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa – jasa (C), permintaan sektor bisnis barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk kegiatan ekspor dan impor (X-M).

## **2. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar**

Teori pertumbuhan ekonomi ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Kedua ahli ini menggunakan proses perhitungan yang berbeda, tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar melihat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi :

- Perekonomian bersifat tertutup,
- Hasrat menabung ( $MPS=s$ ) adalah konstan
- Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constan return scale*)
- Tingkat pertumbuhan angkatan kerja konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proporsional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (Capital Output Ratio/COR) tetap serta perekonomian terdapat dari dua sektor ( $Y = C + I$ )

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis, bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan berikut:

$$g = K = n$$

Dimana:  $g = growth$  (pertumbuhan)

$K = capital$  (tingkat pertumbuhan modal)

$n = tingkat$  pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya pada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulan menunjukkan, bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi juga didasarkan pada komposisi utang luar negeri yang terjadi di negara berkembang yang disebabkan oleh minimnya tabungan domestik (*saving*) dalam membiayai pembangunan nasional. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa angka pertumbuhan diperoleh dengan membagi tabungan domestik (*saving*), dengan *rasio incremental capital output* (ICOR). Jika jumlah tabungan domestik tidak mencukupi proyeksi angka pertumbuhan, maka solusi untuk menutupi defisit menggunakan utang luar negeri (Williamson and Sachs, 1985).

### 3. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan Neo-Klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda dari teori Keynes dan teori Harrod-Domar, yaitu melihat dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan :

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Dimana,

- $\Delta Y$  adalah tingkat pertumbuhan ekonomi.
- $\Delta K$  adalah tingkat pertumbuhan modal.
- $\Delta L$  adalah tingkat pertumbuhan penduduk.
- $\Delta T$  adalah tingkat perkembangan teknologi.

Menurut analisis Solow, faktor penting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan tenaga kerja, faktor yang paling

penting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

Sumbangan terpenting dari teori pertumbuhan Neo-Klasik bukanlah dalam menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam sumbangannya untuk menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penyelidikan empiris dalam menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam penyelidikan Abramovits dan Solow menunjukkan bahwa yang menjadi penyebab penting pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat adalah perkembangan teknologinya. Setelah itu beberapa ahli ekonomi lain melakukan penyelidikan mengenai hal yang sama, salah satu yang terkenal adalah yang dilakukan oleh Denison yang menganalisis faktor yang mengakibatkan perkembangan di negara maju di antara tahun 1950-1962. Dan hasil dari studi Denison menunjukkan bahwa bukan modal, tetapi teknologi dan perkembangan keterampilan yang menjadi faktor utama yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

#### **2.1.1.2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi**

Kesuksesan suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Sementara kesuksesan pemerintahan suatu negara dilihat dari kemampuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Pertumbuhan ekonomi ini penting untuk diperhatikan bahkan terus ditingkatkan karena menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah dan jajarannya dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera bagi rakyatnya. Oleh sebab itu, setiap negara senantiasa berusaha untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya agar mencapai

optimal. Berhasil tidaknya pencapaian pertumbuhan ekonomi suatu negara dicirikan dengan hal-hal berikut.

1. Produktivitas meningkat
2. Laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita tinggi
3. Laju perubahan struktural tinggi
4. Adanya gelombang urbanisasi, yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota
5. Ekspansi negara maju

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara mengindikasikan tingkat kesejahteraan rakyat yang tinggi pula. Banyak faktor yang bisa dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi, di antaranya:

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama satu tahun. Dari sini jelas bahwa indikator pertumbuhan ekonomi salah satunya ditunjukkan oleh nilai PDB (Produk Domestik Bruto). PDB merepresentasikan pendapatan nasional riil yang dihitung dari keseluruhan output dari barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Syarat bagi suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila nilai PDB atau pendapatan nasional riil mengalami kenaikan dari periode sebelumnya.

b. Pendapatan riil per kapita

Pendapatan riil per kapita menunjukkan pendapatan masyarakat suatu negara. Jika pendapatan masyarakat secara keseluruhan mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian di negara tersebut juga mengalami pertumbuhan yang positif.

c. Kesejahteraan penduduk

Indikator kesejahteraan penduduk ini memiliki keterkaitan dengan pendapatan riil per kapita. Semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara tentu harus ditunjang dengan distribusi yang lancar. Jika distribusi barang dan jasa lancar, maka distribusi pendapatan per kapita di seluruh wilayah negara merata. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di negara tersebut.

d. Tingkat penyerapan tenaga kerja dan pengangguran

Ketika lapangan kerja tersedia sehingga tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi, saat itulah negara mengalami pertumbuhan ekonomi. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi jelas berpengaruh pada berkurangnya angka pengangguran, artinya hal itu menyebabkan produktivitas meningkat

### **2.1.1.3. Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, yang diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) (Arsyad et al., 2006).

Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara, dapat dilihat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$G = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

G = Laju pertumbuhan ekonomi

$Y_t$  = Produk domestik bruto (GDP) pada tahun t

t = Tahun sekarang

$Y_{t-1}$  = Produk domestik bruto (GDP) pada tahun t-1

t-1 = Tahun sebelumnya

### **2.1.2. Ekspor**

Menurut Andrelisa 2018 (dikutip dari Basuki Pujoalwanto:2013), kegiatan menjual barang atau jasa kenegara lain di sebut ekspor. Adanya aliran perdagangan berupa ekspor ke negara-negara tujuan ekspor dapat dikarenakan ekspor dari negara eksportir maupun permintaan ekspor dari negara importer. Penawaran ekspor adalah jumlah suatu komoditas yang dapat dijual oleh suatu negara. Semakin banyak jumlah yang diproduksi, maka penawaran ekspor suatu negara akan meningkat

Menurut KBBI, ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri. Baramg dagangan yang dimaksud berupa barang secara fisik ataupun jasa. Ekspor adalah salah satu tolak ukur penting untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dari kegiatan ekspor tersebut dapat terjamin kegiatan bisnis disektor rill semakin terjaga. Dalam memproduksi

barang tidak hanya berputar di dalam negeri saja akan tetapi juga berputar di perdagangan Internasional.

Menurut undang-undang pasal 1 ayat 14 tentang bea yaitu bahwa pemerintah meningkatkan cadangan devisa dengan arus ekspor. Maka dari itu pemerintah melakukan himbauan agar setiap barang yang ingin keluar dari Indonesia atau disebut ekspor agar dimudahkan tanpa melakukan pemeriksaan fisik barang terkecuali untuk ekspor barang.

#### **2.1.2.1. Teori Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional terdapat dua teori yaitu teori klasik dan teori modern.

##### **1) Teori Klasik**

###### **a. Keunggulan absolut**

Teori Adam Smith mengenai teori keunggulan absolut biasa disebut dengan teori murni perdangan internasional. Dasar pemikiran dari teori ini yaitu bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi terhadap ekspor dari jenis barang tertentu. Negara-negara tersebut mempunyai keunggulan absolut (*absolute advantage*) dan tidak memproduksi atau melakukan impor jenis barang lain dimana negara tersebut tidak mempunyai keunggulan absolut (*absolute advantage*) terhadap negara lain yang memproduksi jenis barang yang sama. Dapat disimpulkan bahwa teori ini menekankan efisiensi dalam penggunaan input, yakni tenaga kerja di dalam produksi dengan menentukan keunggulan dan tingkat daya saing.

b. Teori keunggulan kooperatif

Teori ini dikemukakan oleh J.S Mill dan David Ricardo merupakan kritik penyempurnaan terhadap teori Adam Smith yaitu teori keunggulan absolut. Dasar pemikiran teori ini yaitu bahwa terjadinya perdagangan internasional pada dasarnya tidak berbeda. J.S Mill menganggap bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri pada ekspor barang tertentu bila negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) terbesar.

Menurut David Ricardo antara dua negara akan melakukan perdangan ekspor atau impor jika masing masing negara memiliki biaya relatif rendah untuk jenis barang yang berbeda. David Ricardo menekankan pada perbedaan efisiensi relatif antar negara dalam memproduksi dua atau lebih jenis barang yang menjadi dasar terjadinya perdagangan internasional.

**2) Teori Modern (H-O)**

Teori Hecksher dan Ohlin (H-O) biasa disebut dengan teori proporsi (*factor proportion*) atau teori faktor ketersediaan (*factor endowment*). Dasar teori ini yaitu perdagangan internasional terjadi jika *opportunity cost* berbeda antar kedua negara tersebut. Perbedaan ongkos alternatif disebabkan karena adanya perbedaan dalam jumlah faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, bahan baku. Faktor *endowment*-nya yang berbeda, maka sesuai ketentuan hukum pasar, harga dari faktor-faktor produksi antar kedua negara berbeda.

### **2.1.2.2. Peran Ekspor Dalam Perekonomian**

Dalam perspektif yang luas pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses multidimensi yang meliputi berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan, serta pengentasan kemiskinan Todaro, (Basuki Pujoalwanto. 2013).

Menurut Sukirno (Basuki Pujoalwanto. 2013), pertumbuhan ekonomi di artikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi bertambah dan kemakmuran meningkat.

Dalam suatu nega Ekspor dan investasi memegang peran penting dalam kegiatan perekonomian. Ekspor dapat menghasilkan devisa yang akan digunakan untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal yang diperlukan dalam proses produksi yang akan membentuk nilai tambah. Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam perekonomian merupakan nilai Produk Domestik Bruto.

### **2.1.3. Pendapatan Pajak**

Menurut Waluyo (2009:2), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undangundang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan Undang-Undang) yang diterima oleh negara lain dalam suatu periode yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

#### **2.1.3.1. Fungsi Pajak**

Pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan Negara dan masyarakat Resmi (2013: 3), yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Fungsi pajak menurut Waluyo (2007: 6) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula dengan barang mewah.

Dari kedua penjelasan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat diambil inti dari fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi penerimaan sebagai sumber pemasukan negara yang berasal dari pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara.

2. Fungsi mengatur sebagai alat yang digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi seperti pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah.

### **2.1.3.2. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011: 7), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Self Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **2.1.3.3. Hambatan Pemungutan Pajak**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di

tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2011: 8), hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

#### **2.1.3.4. Penggolongan Pajak**

Pajak menurut Resmi (2013: 43) dapat dikelompokkan ke dalam golongan sebagai berikut:

### 1. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut pajak langsung (jadi langsung dikenakan pada subjeknya). Dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian dicari syarat-syarat objektifnya.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat kaitannya dengan objek pajak, yang selain daripada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Besarnya tidak ditentukan oleh keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung pada subjeknya. Dimulai dengan objeknya, seperti keadaan, peristiwa, perbuatan dan lain-lain. Baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya, yaitu subjeknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

### 2. Menurut Pembebanannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik).
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang langsung dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang

tidak bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain dan membayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak.

Contoh: PPN dan PPnBM, Bea Materai.

### 3. Menurut kewenangannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunannya.

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **2.1.4. Pengeluaran Pemerintah**

Dalam konteks ekonomi makro, *government expenditure* (pengeluaran pemerintah) adalah salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) selain dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis untuk barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa (G) dan pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dan impor (X-M). Secara matematis dapat dirumuskan:  $Y = C + I + G + (X-M)$  (Dumairy, 2006).

Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian. Fungsi-fungsi yang diemban pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal (dengan salah satu penekanannya) melalui kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah. Dari sini, pemerintah melalui kebijakannya dapat melakukan belanja dalam rangka memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengeluaran pemerintah merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004). Pengeluaran pemerintah dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Dewi (2006) dan Syaiful (2008) mengutarakan bahwa pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Kategori pengeluaran pemerintah menurut Ghozali (2008) adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang Sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

#### **2.1.4.1. Jenis – Jenis Pengeluaran Pemerintah**

Menurut Kementrian Keuangan (KEMENKEU), pengeluaran pemerintah ada beberapa jenis :

a. Pengeluaran Pemerintah Tanah

Pengeluaran pemerintah tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Pengeluaran Pemerintah Peralatan dan Mesin

Pengeluaran pemerintah peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Pengeluaran Pemerintah Gedung dan Bangunan

Pengeluaran pemerintah gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Pengeluaran Pemerintah Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengeluaran pemerintah jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.

e. Pengeluaran Pemerintah Fisik lainnya

Pengeluaran pemerintah Fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria pengeluaran pemerintah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah pengeluaran pemerintah kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang peurbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

#### **2.1.5. Utang Luar Negeri**

Pinjaman atau utang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dipinjam dari pihak lain dengan kewajiban dibayarkan kembali. Jadi dapat diartikan pinjaman luar negeri adalah pinjaman yang berasal dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan wajib dibayarkan kembali.

Utang pada dasarnya adalah suatu alternatif yang dilakukan karena berbagai alasan yang rasional yang memiliki alasan berdasarkan muatan urgensi dan muatan ekspansi. Muatan urgensi merupakan kemungkinan utang dipilih sebagai sumber pembiayaan karena derajat kebutuhan yang segera membutuhkan penyelesaian, sedangkan muatan ekspansi merupakan alternatif

pembiayaan (utang) yang dapat memberikan keuntungan melalui berbagai hitungan teknis dan ekonomis (Khairin, 2013).

Utang luar negeri termasuk dalam penerimaan negara baik itu dalam bentuk devisa maupun dirupiahkan ataupun dalam bentuk lain seperti barang dan jasa yang diterima dari pemberi pinjaman/hibah yang harus dibayar dengan persyaratan tertentu. Sumber dana untuk hutang atau pinjaman ini bermacam-macam, bisa didapatkan dari lembaga keuangan internasional seperti IMF, pasar uang internasional, maupun dari bank negeri maupun swasta dari luar negeri. Persyaratan yang di berikan kepada negara penerima biasanya juga berbeda-beda seperti dalam penentuan bunga hutang, maupun waktu pengembalian hutang. Hal ini terjadi berdasarkan kesepakatan bersama dari ke dua pihak baik itu pemberi hutang maupun penerima pinjaman.

#### **2.1.5.1. Teori Utang Luar Negeri**

Negara berkembang seperti Indonesia yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang terhambat pada faktor pendanaan. Untuk mempercepat gerak pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka sumber pendanaan yang digunakan oleh Indonesia adalah salah satunya bersumber dari utang. Penggunaan utang sebagai salah satu sumber pendanaan dalam mempercepat pembangunan nasional digunakan karena sumber pendanaan dari tabungan dalam negeri jumlahnya sangat terbatas, sehingga sebagai sumber pendanaan, utang khususnya utang dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah pembiayaan dalam pembangunan. Sumber pendanaan yang berasal dari utang menjadi salah satu alternatif biaya

pembangunan bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia (Ramdhani, 2014).

Berikut jenis-jenis utang luar negeri dari berbagai aspek yaitu berdasarkan bentuk pinjaman yang diterima, sumber dana pinjaman, jangka waktu peminjaman, status penerimaan pinjaman dan persyaratan pinjaman (Tribroto dalam Ayu, 2016).

Berdasarkan bentuk pinjaman yang diterima, pinjaman dibagi atas:

- a. Bantuan proyek, yaitu bantuan luar negeri yang digunakan untuk keperluan proyek pembangunan dengan cara memasukkan barang modal, barang jadi dan jasa.
- b. Bantuan teknik, yaitu pemberian bantuan tenaga-tenaga terampil atau ahli.
- c. Bantuan program, yaitu bantuan yang dimaksudkan untuk dana bagi tujuan-tujuan yang bersifat umum sehingga penerimanya bebas memilih penggunaannya sesuai pilihan.

Berdasarkan sumber dana pinjaman, pinjaman dibagi atas:

- a. Pinjaman dari lembaga internasional, yaitu merupakan pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional seperti *World Bank* Asia dan *Development Bank*, yang pada dasarnya adalah pinjaman yang berbunga ringan.
- b. Pinjaman dari negara-negara anggota IGGI/IGI, hampir sama seperti pinjaman dari lembaga internasional, hanya biasanya pinjaman ini

dari negara-negara bilateral anggota IGGI/IGI. Biasanya berupa pinjaman lunak.

Berdasarkan jangka waktu peminjaman, pinjaman dibagi atas:

- a. Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun.
- b. Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman dengan jangka waktu 5-15 tahun.
- c. Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman dengan jangka waktu di atas 15 tahun.

Berdasarkan status penerimaan pinjaman, pinjaman dibagi atas:

- a. Pinjaman pemerintah, yaitu pinjaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah.
- b. Pinjaman swasta, yaitu pinjaman yang dilakukan oleh pihak swasta.

Berdasarkan persyaratan pinjaman, pinjaman dibagi atas:

- a. Pinjaman lunak, yaitu pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral maupun bilateral yang dananya berasal dari iuran anggota (untuk multilateral) atau dari anggaran negara yang bersangkutan (untuk bilateral) yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan.
- b. Pinjaman setengah lunak, yaitu pinjaman yang memiliki persyaratan pinjaman yang sebagian lunak dan sebagian komersial. Pinjaman komersial, yaitu pinjaman yang bersumber dari bank atau lembaga

keuangan dengan persyaratan yang berlaku di pasar internasional pada umumnya.

#### **2.1.5.2. Dampak Dari Utang Luar Negeri**

Dampak positif dari utang luar negeri yaitu terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat. Sebab, alirannya dapat meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik sehingga utang luar negeri menghasilkan *multiplier effect* positif terhadap perekonomian, kemudian terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat sebagai dampak lanjutannya. Alasannya, aliran bantuan luar negeri dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik dan seterusnya (Wahyuningsih, 2012).

Utang luar negeri juga menimbulkan dampak negatif, hal ini dialami oleh Indonesia pada saat terkena dampak krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Pada saat itu nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang cukup memprihatinkan terhadap US Dolar dan mata uang dunia lainnya. Keadaan tersebut membuat utang luar negeri Indonesia meningkat drastis dan untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo, pemerintah mengambil kebijakan penambahan utang baru. Penambahan utang yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan pembayaran cicilan pokok dan bunga dari utang tersebut makin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kinerja APBN yang semakin menurun (Widharma, 2013).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai “Pengaruh Ekspor, Pendapatan Pajak, Pengeluaran Pemerintah, dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2005-2021”. Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan penelitian ini.

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rinaldi Syahputra, 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.	Pertumbuhan Ekonomi, Ekspor, Penerimaan Pajak.	Pengeluaran Pemerintah, Utang Luar Negeri.	Hubungan dan pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan. Hubungan dan pengaruh pendapatan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan.	Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 01, No. 02. Oktober 2017.
2.	Mutia Sari, 2016. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia	Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah	Ekspor, Pendapatan Pajak, Utang Luar Negeri	Pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.	Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Volume 3 Nomor 2, November 2016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	I Gede Saputra, I Wayan Wita Kesumajaya, 2016. Pengaruh Utang Luar Negeri, Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1996-2013.	Pertumbuhan Ekonomi, Ekspor, Utang Luar Negeri.	Pendapatan Pajak, Pengeluaran Pemerintah	Hubungan dan pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif dan signifikan. Hubungan dan pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan.	E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana.
4.	Abdul Malik dan Denny Kurnia, 2017. Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Pertumbuhan Ekonomi, Utang Luar Negeri.	Ekspor, Pendapatan Pajak, Pengeluaran Pemerintah	Hubungan dan pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan.	Jurnal Akuntansi, Vol. 3 No. 2. Januari 2017.
5.	Estro Dariatno Sihalo, 2020. Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vektor autoregressive	Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Pajak	Ekspor, Pengeluaran Pemerintah, Utang Luar Negeri	Hubungan dan pengaruh pendapatan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan.	E-Journal feb unmul Forum Ekonomi, 22 (2) 2020, 202-209
6.	Dian Rizky Ayu Pratiwi, 2013. Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Ekspor Terhadap	Pertumbuhan Ekonomi, Ekspor	Pendapatan Pajak, Pengeluaran Pemerintah, Utang Luar Negeri	Hubungan dan pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan.	E-journal unesa Vol 1 No 3 (2013)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur				
7.	Efrizal Hasan, Syamsul Amar, Ali Anis, 2014. Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat.	Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah	Ekspor, Pendapatan Pajak, Utang Luar Negeri	Hubungan dan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah signifikan.	Jurnal Ekonomi Pembangun an. Vol. 3 No.1. 41- 49.
8.	M. Khairin Majid , 2013. Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri (ULN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1986- 2011	Pertumbuhan Ekonomi, Utang Luar Negeri	Ekspor, Pendapatan Pajak, pengeluaran Pemerintah	Hubungan dan pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. Vol 1, No 2
9.	Hapta Risnitia, 2020. Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Pertumbuhan Ekonomi, Ekspor	Pendapatan Pajak, pengeluaran Pemerintah, Utang Luar Negeri	Hubungan dan pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan.	Repository, Universitas Islam Riau

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Eric Van Basten, Syarifah Hidayah, dan Irwan Gani, 2021. Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya pada Pengangguran Terbuka di Indonesia.	Pertumbuhan Ekonomi, Utang Luar Negeri	Ekspor, Pendapatan Pajak, Pengeluaran Pemerintah	Hubungan dan pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif dan signifikan.	E-Journal feb unmul Forum Ekonomi, 23 (1) 2021, 340-350.
11.	Refilio Andika Pratama dan Shinta Widyastuti, 2022. Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia	Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Pajak	Ekspor, Pengeluaran Pemerintah, Utang Luar Negeri	Hubungan dan pengaruh pendapatan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif dan signifikan.	Veteran Economics, Management, & Accounting Review Vol. 1, No. 1, 2022 pp. 104-120

### 2.3. Kerangka Pemikiran

#### 2.3.1. Hubungan Ekspor dengan Pertumbuhan Ekonomi

Ekspor merupakan salah satu perdagangan internasional yang harus dilakukan negara dalam menambah cadangan devisa dan memperkuat perekonomian nasional. Sektor ekspor mempunyai peranan cukup besar dalam Pertumbuhan Ekonomi. Indonesia mengandalkan sektor ekspor sebagai sumber

pemasukan devisa, peran ekspor sebagai sumber pendapatan devisa berfungsi dalam pendanaan impor dan pembangunan sektor ekonomi dalam negeri.

Menurut Dian (2013) dalam penelitian sebelumnya ekspor sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini karena kegiatan ekspor dapat memberikan devisa yang sangat besar. Ekspor secara luas ke berbagai negara memungkinkan peningkatan jumlah produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Saputra dan Wita (2016) menyatakan bahwa ekspor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **2.3.2. Hubungan Pendapatan Pajak Dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)), menyatakan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Penerimaan perpajakan rata-rata sekitar 70 persen dari total pendapat negara. Tentu ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN sangat besar. Karena peranan pajak semakin besar maka penerimaan perpajakan membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga peranan cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi. Terdapat hubungan negatif antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Andika dan Shinta (2022) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan memperoleh hasil bahwa penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal serupa dilakukan juga oleh Rinaldy Syahputra (2017) dan memperoleh hasil yang serupa.

### **2.3.3. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pengeluaran ditujukan untuk mencapai stabilitas perekonomian yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang merupakan kebijakan fiskal yaitu sebuah tindakan untuk mengatur jalannya perekonomian dengan menentukan penerimaan dan pengeluaran pemerintah di setiap tahunnya. Sehingga pengeluaran pemerintah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang (Azwar 2016).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutia Sari (2016) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi Hal ini juga sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Keynes, pengeluaran pemerintah akan berdampak terhadap ekonomi dalam negeri. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2013) yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

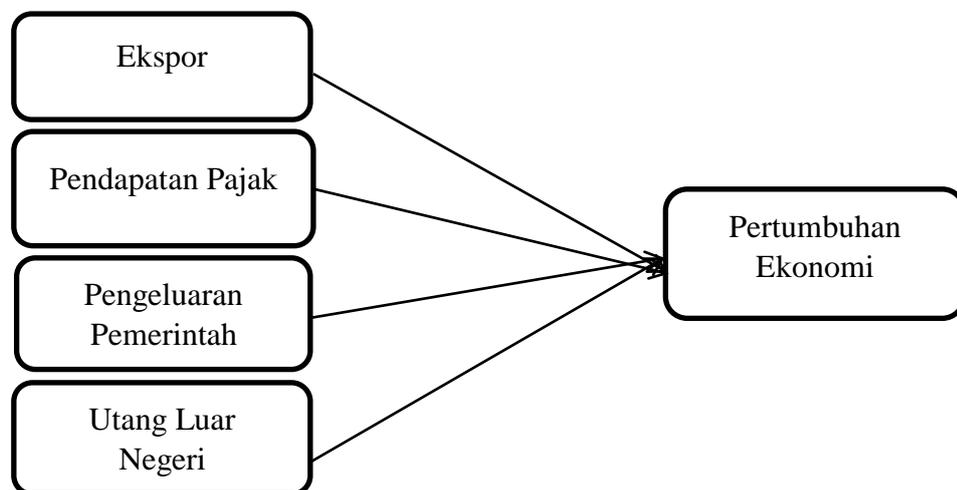
### **2.3.4. Hubungan Utang Luar Negeri Dengan Perumbuhan Ekonomi**

Pinjaman luar negeri atau utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam menjalankan pembangunan perekonomian. Pinjaman luar negeri berperan dalam menutupi defisit anggaran dimana pengeluaran pemerintah lebih besar dari pada penerimaan yang mengakibatkan adanya defisit anggaran, sehingga pemerintah membutuhkan tambahan penerimaan salah satunya melalui pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri pun dapat menstimulus program-program pembangunan yang dapat menggerakkan aktivitas

dan perkembangan ekonomi sehingga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik dan Denny Kurnia (2017) yang menyatakan bahwa utang luar negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi berbeda dengan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eric Van Basten, Syarifah Hidayah, dan Irwan Gani (2021) yang menjelaskan bahwa utang luar negeri memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian, dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan pengaruh ekspor, pendapatan pajak, pengeluaran pemerintah, dan utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut ini gambaran kerangka pemikiran yang skematis:



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**

## **2.4. Hipotesis**

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kajian terhadap penelitian terdahulu tentang pertumbuhan ekonomi, maka dalam penelitian ini akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial pendapatan pajak berpengaruh negatif, sedangkan ekspor, pengeluaran pemerintah, dan utang luar negeri memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2005-2021.
2. Diduga secara bersama ekspor, pendapatan pajak, pengeluaran pemerintah, dan utang luar negeri, dan nilai tukar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2005-2021.